

DEMOKRASI DELIBERATIF POLITIK PEKERJA PERS: KOMUNIKASI RUANG PUBLIK PEKERJA MEDIA MASSA DI KEDAI KOPI PERJOEANGAN JAKARTA

Deliberative Democracy in Press Workers' Politics: Public-Sphere Communication among Mass Media Workers at Kedai Kopi Perjoeangan Jakarta

Radita Gora

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Satya Negara Indonesia

*Email: radita.gora026@gmail.com

Abstract: *This study examines press workers' political involvement, welfare pressures, and struggles for journalistic professionalism through the public sphere. It aims to understand the lifeworld of mass media workers and the role of Kedai Kopi Perjoeangan Jakarta as a journalists' public sphere for deliberative democracy. The study employed a qualitative approach using snowball sampling, non-participant observation, and documentation. The data were interpreted through Habermasian hermeneutics. The findings show that the coffee shop provides a communication space where press workers discuss political pressures, welfare, ethics, and professional rights. These discussions build participation and shared aspirations, although communication may be either rational or strategic. The venue therefore operates both as a deliberative arena and as a site for organizing press workers' professional demands.*

Keywords: Deliberative Democracy; Press Workers; Public Sphere; Journalistic Professionalism; Mass Media Industry

Abstrak: Penelitian ini mengkaji keterlibatan politik pekerja pers, tekanan kesejahteraan, dan perjuangan profesionalitas jurnalistik melalui ruang publik. Penelitian bertujuan memahami dunia kehidupan pekerja pers media massa serta peran Kedai Kopi Perjoeangan Jakarta sebagai ruang publik wartawan dalam mewujudkan demokrasi deliberatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui snowball sampling, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Data ditafsirkan menggunakan hermeneutika Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedai kopi menjadi ruang komunikasi pekerja pers untuk membicarakan tekanan politik, kesejahteraan, etika, dan hak profesional. Diskusi tersebut membangun partisipasi dan aspirasi bersama, meskipun komunikasi di dalamnya dapat bersifat rasional maupun strategis. Ruang publik ini karena itu berfungsi sebagai arena deliberasi sekaligus pengorganisasian tuntutan profesional pekerja pers.

Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif; Pekerja Pers; Ruang Publik; Profesionalitas Jurnalistik; Industri Media Massa

1. Pendahuluan

Persoalan pekerja media bukan hanya ketidakobjektifan media dalam memuat konten-konten yang non objektif dan bersifat provokatif, namun persoalan pekerja media ini terkadang ada keterlibatan dalam berbagai aktivitas ataupun masuk dalam lingkup perpolitikan di luar kepentingan media dengan memihak pada salah satu pandangan politik tertentu. Seperti keterlibatan pada salah satu partai, ikut menjadi staf atau bagian tangan kanan dari salah satu tokoh politik serta ikut dalam mengatur strategi untuk memperoleh kekuasaan bagi partai atau tokoh politik tertentu. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kaidah dari pekerja media yang mengutamakan objektivitas dan pemenuhan etika dalam bekerja.

Tak jarang praktik suap di kalangan wartawan pun juga kerap terjadi. Banyak oknum wartawan seringkali memanfaatkan situasi untuk menjadikan sebuah kasus atau peristiwa sebagai 'ladang basah'. Praktek gelap macam ini sering tidak terdeteksi, kecuali apabila ada masyarakat yang melaporkan tindakan tidak menyenangkan dari wartawan yang cenderung meresahkan narasumber. Seperti bentuk pemerasan yang dilakukan wartawan yang telah melakukan investigasi di lapangan dan cenderung membocorkan berita ataupun mem "pelintir" berita untuk menyudutkan narasumber. Berdasarkan praktik jurnalistik menyimpang ini yang kemudian dapat menjatuhkan nilai-nilai filosofis kebebasan pers itu sendiri. Tidak jarang pekerja media yang sudah memiliki kedudukan tinggi di media massa baik sebagai koordinator peliputan sampai pada pimpinan redaksi, melalui nama dan kedudukan yang dimiliki mencoba memanfaatkan relasi (jaringan) politik yang dimilikinya untuk mencari 'ladang basah' dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari aktivitas perpolitikan di luar dari pekerjaannya sebagai profesi yang sebenarnya. Namun keadaan wartawan yang mampu membangun relasi politik di dalamnya, tak jarang juga dimanfaatkan oleh para petinggi media itu sendiri untuk memanfaatkan jaringan berita dan suplai dana untuk konten di media sehingga menjadi pemasukan bagi para pekerja media itu sendiri. Sehingga, dalam hal ini terjadi semacam krisis legitimasi bagi para pekerja pers di bawahnya atau staf yang bekerja di lapangan untuk mengabaikan perolehan data secara benar, namun menekankan perolehan data secara politis. Legitimasi yang berkembang bagi para pekerja adalah melibatkan diri sebagai joki politik di dalam ranah perpolitikan bagi pihak-pihak tertentu, sementara itu staf pers di lapangan juga harus ikut bermain dalam perolehan informasi secara tidak wajar serta menekankan pengambilan keuntungan bagi media massa itu sendiri, serta keuntungan para pemilik kuasa di media sementara pekerja di lapangan hanya mengikuti apa yang ditekankan oleh atasan serta narasumber yang dijadikan sebagai bahan berita dan pemberi keuntungan lebih.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya suatu konflik teoritis pekerja di lapangan atau staf wartawan di lapangan dalam menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan

etika dan merasa telah menjadi bagian dari tekanan politis para petinggi media dalam memperoleh keuntungan sepihak. Para pekerja di lapangan pun seringkali merasa bahwa dirinya tidak memiliki sisi demokrasi dalam menentukan sikap untuk menyikapi realitas politik yang menjadi bagian dari pemberitaan yang diperolehnya. Ketika berada di lapangan, para pekerja media terlihat seperti ‘dibungkam’ untuk tidak bisa mengungkapkan pendapat karena terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan petinggi media termasuk pemilik media dalam urusan politik di luar. Satu sisi pekerja pers sendiri juga dibalut pada tekanan kepentingan pekerjaan dan alienasi pekerja terhadap kepentingan finansialnya. Selain itu, para pekerja media pun harus mau, secara simbolis, menerima tekanan politis dari petinggi media untuk tidak mengedepankan objektivitas pemberitaan, melainkan ada kepentingan politis yang subjektif serta legitimasi dari media untuk dipaksakan mengikuti ideologi dan kepentingan yang menguntungkan dari sisi lembaga media. Pekerja media lapangan hampir tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta tanpa berpihak serta mengambil sikap.

Meski kurang begitu mendapatkan tempat dalam mengungkap kebenaran secara terbuka dan mengambil sikap secara penuh, wartawan lapangan kerap memanfaatkan ruang publik umum dalam menyatakan sikap mereka. Seperti keberadaan Kedai Kopi Perjoeangan Jakarta yang menjadi ruang publik politis bagi wartawan di Jakarta dalam menyampaikan dan menyatakan sikap tentang kebebasan dan demokrasi pekerja media serta kebebasan politis pekerja dalam membangun kuasa pekerja pers maupun kelompok pekerja dan asosiasi yang berkaitan. Para wartawan juga memanfaatkan ruang publik seperti kedai kopi Perjoeangan sebagai wadah untuk pergerakan yang menuntut kepentingan politis bagi kelompok wartawan itu sendiri dengan membela para pekerja pers yang di bawah lini manajerial atau pekerja wartawan yang kerap di lapangan, serta membuat suatu pergerakan yang terselubung dan juga pergerakan terbuka untuk membentuk suatu aspirasi pekerja media terutama pers di Jakarta. Kedai ini kemudian juga menjadi bagian dari pembentukan kekuatan demokrasi bagi wartawan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran Habermas dalam melakukan pengkajian terhadap kasus dan permasalahan komunikasi yang dialami oleh para pekerja pers media massa.

Penelitian ini berangkat dari pertentangan yang dialami pekerja pers ketika legitimasi politik dan ideologi media membatasi otonomi profesional mereka. Tujuannya adalah memahami dunia kehidupan pekerja pers dalam ruang publik serta menjelaskan peran Kedai Kopi Perjoeangan sebagai ruang publik wartawan dalam mewujudkan demokrasi deliberatif.

2. Kajian Literatur

2.1. Demokrasi Deliberatif

Istilah “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio* yang lalu di dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau kita telah memiliki kosa kata politis ini “musyawarah”. Penggabungan-nya dengan istilah “demokrasi” memberi makna khusus pada konsep demokrasi itu. Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan tersebut. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan=keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warga negara mematuhi aturan-aturan ini. Dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Opini-opini itu juga dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren yang dianggap sah secara universal dan rasional. (Hardiman, 2009b: 129).

Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu. Ruang publik adalah wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan pandangan demokrasi melalui kebebasan berpendapat, mengemukakan maupun membentuk pandangan serta dialektis penemuan diri individu dalam hal gagasan dan ide yang dikemukakan.

2.2. Teori Sudut Pandang

Teori Sudut Pandang (Standpoint theory) mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu memengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial. Permulaan untuk memahami pengalaman bukanlah kondisi sosial, ekspektasi peran, atau definisi gender, tetapi cara khusus di mana individu membentuk kondisi tersebut dan pengalaman mereka di dalamnya. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang dibentuk sebagian besarnya oleh kelompok sosial di mana mereka tergabung. (Littlejohn & Foss, 2009: 135).

Teori sudut pandang berpijak pada lima asumsi mengenai kehidupan sosial (West dan Turner, 2008:181):

1. Kehidupan material (atau posisi kelas) menyusun dan membatasi pemahaman akan hubungan sosial.
2. Ketika kehidupan material distrukturkan dalam dua cara yang berlawanan untuk dua kelompok yang berbeda, pemahaman yang satu akan menjadi kebalikan dari yang satunya. Ketika terdapat kelompok dominan kelompok bawahan, dan pemahaman dari kelompok yang dominan akan bersifat parsial dan merugikan.
3. Visi dari kelompok yang berkuasa menyusun hubungan material di mana semua kelompok dipaksa berpartisipasi.
4. Visi yang ada bagi kelompok yang tertindas merepresentasikan pergulatan dan prestasi.
5. Potensi pemahaman dari mereka yang tertindas (sikap) membuat dapat dilihatnya ketidakmanusiawinya dari hubungan yang ada di antara kelompok dan menggerakkan kita menuju dunia yang lebih baik dan lebih adil.

2.3. Tindakan Komunikatif Habermas

Pandangan mengenai rasionalitas, Habermas mengadopsi dari pemikiran Weber melalui teori rasionalisasi. Menurut Pusey (2011: 27), orientasi teori sosial Habermas secara fundamental bersifat Weberian karena ia ingin menganalisis budaya, pengetahuan, dan nalar sebagai bentuk yang Weber sebagai, dalam definisinya yang terkenal tentang Sosiologi yaitu “tindakan sosial yang bermakna”. Bagi Habermas, budaya adalah tindakan karena budaya adalah hal yang dilakukan oleh subjek, baik dalam pemikiran maupun perbuatan. Untuk memahami maksud dari istilah rasionalitas komunikatif, maka di sini dibutuhkan juga pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang diarahkan atau bekerja untuk mengejar seefektif mungkin kepentingan diri sendiri, bersifat mendominasi dan menghegemoni. Rasionalitas instrumental ini juga bersifat monologis, dan juga bertujuan untuk mengontrol. Berbeda dengan rasionalitas instrumental, rasionalitas komunikatif adalah “rasionalitas” yang bekerja untuk mencapai kesepahaman bersama melalui bahasa atau sarana-sarana komunikasi yang lain. Dengan demikian rasionalitas komunikatif ini lebih bersifat dialogis ketimbang monologis, lebih ditujukan untuk mencapai penerangan(pencerahan) ketimbang paksaan atau dominasi.

Dalam praksis komunikasi, ilmu pengetahuan dipahami sebagai rekonstruksi yang membedakan pemahaman Habermas tentang ilmu pengetahuan sebagai refleksi dan pemahaman tradisional yang mengartikan ilmu pengetahuan sebagai sistem tertutup atau saintisme. Komunikasi menjadi alat refleksi kelompok masyarakat dalam mencari pembenaran dari sebuah fakta yang ada. Sebagai rekonstruksi, pemahaman baru mengenai ilmu pengetahuan mensyaratkan kebebasan dan kesamaan derajat dalam sebuah aksi-tindak tutur yang bertujuan menguji validitas klaim ilmiah berdasarkan pengujian yang secara diskursif dilakukan dalam semangat meningkatkan pemahaman bersama yang diterima karena alasan yang lebih baik dan lebih rasional. Ilmu pengetahuan rekonstruktif menekankan kepentingan komunikatif yang menjunjung validitas klaim sebagai pemahaman timbal balik dan diperoleh melalui pertukaran argumentasi. (Hardiman, 2009: 33). Tingkat-tingkat pembenaran yang lebih tinggi ini secara umum diperlukan untuk menyokong suatu masyarakat yang strukturnya lebih berkembang tetapi juga merupakan masyarakat pramodern dan tradisional yang memiliki karakteristik khas lainnya karena masyarakat ini diatur melalui aparatur negara yang kurang lebih dibedakan dengan jelas. Adapun dalam rasionalitas komunikatif atau tindakan komunikatif, agar saling pengertian dapat tercapai, maka setiap orang yang terlibat dalam praktik komunikasi harus mengandalkan berlakunya beberapa syarat klaim validitas.

Aktivitas komunikasi berorientasi pada empat klaim validitas yang berbeda tetapi saling melengkapi (Lubis, 2015:25):

1. Klaim kebenaran (truth), yaitu klaim menyangkut dunia alamiah objektif. Menyangkut pengungkapan sesuatu dengan benar.
2. Klaim ketepatan (rightness), yaitu klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial. Menyatakan sesuatu sesuai dengan norma/aturan komunikasi.
3. Klaim autentisitas atau kejujuran (sincerity), yaitu klaim tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi. Perkataan yang jujur.
4. Klaim komprehensibilitas (comprehensibility), yaitu klaim tentang kesepakatan karena terpenuhinya tiga klaim di atas sebagai alasan yang mencukupi untuk konsensus.

Interaksi sosial tentu tidak hanya ditandai oleh konsensus yang dicapai secara rasional dan bebas tekanan, melainkan juga ditandai oleh paksaan dan kekerasan. Percakapan juga dapat berfungsi sebagai medium kekuasaan. Dalam hal ini Habermas berbicara tentang dua macam mekanisme tindakan: “mencapai persetujuan secara intersubjektif” atau konsensus dan “memengaruhi” (Einflußnahme). Sementara konsensus terbentuk lewat pengetahuan bersama yang diterima secara intersubjektif, memengaruhi bertitik tolak pada keyakinan monologal yang dianggap tepat dan benar oleh seseorang tanpa pengakuan orang lain. Apa yang dianggap penting dalam memengaruhi orang lain bukanlah alasan-alasan rasional, melainkan sukses atau efek dari tindakan memengaruhi itu. Selain konsep tindakan komunikatif Habermas mengajukan konsep tindakan strategis (strategisches Handeln), yakni tindakan yang berorientasi pada keberhasilan seperti yang terjadi dalam tindakan memengaruhi. Tindakan strategis tersebut mengandaikan bahwa orang mengerti ungkapan-ungkapan bahasa dan juga menjelaskan pendapatnya. Dalam arti ini tindakan strategis sebenarnya bukanlah sebuah alternatif untuk tindakan komunikatif. Tindakan strategis juga bersifat rasional seperti tindakan komunikatif. Lalu apakah perbedaannya? Di dalam tindakan strategis orang menggunakan bahasa tidak sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Sebuah alat untuk memaksakan kehendak lewat kata-kata atau bahkan kekerasan memang dapat dipakai untuk menghasilkan konsensus.

Menurut Habermas dalam Lubis (2015: 26) selain adanya empat syarat atau klaim validitas itu, dalam tindakan komunikatif, Habermas juga menekankan untuk terlaksananya komunikasi yang rasional atau komunikasi yang ideal. Adapun beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, setiap partisipan mesti diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam diskursus serta bebas mengajukan berbagai keberatan (kritik) atas sudut pandang peserta atau partisipan lain. Kedua, dialog yang berjalan mesti bebas dari paksaan, dominasi dan permainan kuasa. Ketiga, partisipan dapat memahami perbedaan kriteria validitas klaim-klaim teoritis, moral-praktis dan estetis yang muncul dalam dialog lantas menyelesaikan dialog dan perbedaan melalui argumen. Keempat, adanya persetujuan atau konsensus rasional terbuka terhadap perubahan dan pertimbangan lebih lanjut.

Habermas juga mengembangkan konsep Lebenswelt (dunia-kehidupan) sebagai pelengkap untuk konsep tindakan komunikatif. Di dalam praksis komunikasi sehari-hari klaim-klaim kesahihan diandaikan begitu saja secara naif. Artinya, kita tidak membuat klaim-klaim itu sebagai tema dan juga tidak memperlmasalahkannya, karena klaim-klaim tersebut

merupakan bagian dari hal-hal yang secara kultural kebenarannya tidak dipersoalkan. Hal-hal yang diandaikan begitu saja ini penting untuk membuat proses pemahaman menjadi mungkin, karena hal-hal itu berfungsi sebagai basis kognitif komunikasi. Untuk komunikasi yang sedang berlangsung hal-hal tersebut membentuk suatu pengetahuan bersama yang bersifat pra-reflektif, tak dipersoalkan dan implisit. Pengetahuan itu beroperasi katakanlah “di belakang panggung” para peserta komunikasi, maka disebut Habermas “Hintergrundwissen” (pengetahuan-latar belakang). Pengetahuan-latar belakang yang membentuk konteks komunikasi ini dan beroperasi di belakang proses-proses komunikasi verbal ini disebut Habermas dengan istilah yang sudah lama dikembangkan di dalam fenomenologi Edmund Husserl, yaitu: *Lebenswelt* (dunia kehidupan). Habermas berpendapat bahwa sebuah pernyataan atau tindakan seseorang bersifat rasional sejauh alasannya dapat dijelaskan atau diakui secara intersubjektif. Penjelasan (*Erklärung*) dan pemberian alasan (*Begründung*) adalah ciri dasar dari klaim-klaim kesahihan yang bersifat rasional. Tidak semua bentuk komunikasi memiliki ciri-ciri tersebut. Secara umum kita bisa membedakan dua bentuk komunikasi: komunikasi “naïf” dan komunikasi “reflektif”. Di dalam praksis hidup sehari-hari kita menggunakan komunikatif naïf. Di dalam komunikasi macam ini kita tidak mempersoalkan secara khusus alasan-alasan maupun kejelasan dari pernyataan kita. Klaim-klaim kesahihan yang kita keluarkan lewat pernyataan-pernyataan kita tidak kita persoalkan, melainkan kebenaran kita andaikan begitu saja. Kita saling menukar informasi begitu saja. Bentuk komunikasi naïf macam itu menandai tindakan komunikatif di dalam *Lebenswelt*. Di dalam percakapan ‘naïf’ sehari-hari ini pembicara dan pendengar menimba informasi ataupun pernyataan-pernyataan mereka begitu saja dari sumber-sumber *Lebenswelt* mereka. Percakapan macam itu disebut Habermas tindakan komunikatif. Bentuk komunikasi macam itu dengan klaim-klaim kesahihan sebagai objek problematisasinya yang oleh Habermas disebut “diskursus” (Wacana). Di dalam diskursus sepenggal *Lebenswelt* kehilangan cirinya sebagai pengetahuan latar belakang (*Hintergrundwissen*) karena setelah dijadikan tema komunikasi, pengetahuan latar belakang ini berubah menjadi pengetahuan-latar depan (*Vordergrundwissen*) yang bersifat eksplisit. Namun sementara konsensus pada tindakan komunikatif telah diterima secara spontan dan dipakai oleh para peserta komunikasi tanpa pikir panjang lagi, para peserta diskursus kali ini harus menghasilkan konsensus lagi, tetapi pada taraf yang reflektif. Diskursus adalah bentuk refleksi (*Reflexionsform*) tindakan komunikatif. Maksudnya adalah bahwa diskursus adalah kelanjutan tindakan komunikatif dengan memakai sarana lain, yakni sarana argumentatif. (Hardiman, 2009: 43-45).

2.4. Ruang Publik dan Media Massa

Ruang publik menurut Habermas dapat dimengerti, di atas segalanya, sebagai ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Mereka mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi dari atas guna melawan otoritas publik. Inilah yang lantas menyeret mereka masuk ke dalam perdebatan seputar kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan-hubungan di dalam ruang pertukaran komoditas dan ruang kerja sosial yang secara mendasar telah terprivatisasi meski secara publik masih relevan. (Habermas, 2010: 41). Habermas mencirikan peran ruang publik itu sebagai “papan pantul untuk masalah-masalah” atau “sistem peringatan dengan sensor-sensor yang tidak terspesialisasi namun sensitif ke seluruh masyarakat”. Hal ini berarti bahwa ruang publik yang berfungsi secara politis tidak hanya mampu mempersepsi, menemukan dan mensistematisasi masalah-masalah sosial-politis, melainkan juga dapat memediasi gaya-gaya hidup partikular yang majemuk dalam orientasi nilai mereka di satu pihak dan institusi-institusi birokratis dan ekonomi di lain pihak. Ruang publik politis membangun “struktur intermediet” di antara kedua hal itu. Ia berfungsi sebagai sinyal untuk problem-problem yang harus dikelola oleh negara karena institusi-institusi formal yang berwenang untuk itu tidak dapat menyalurkan ataupun memecahkan masalah-masalah tersebut secara memuaskan. Pemahaman spontan mengenai ruang publik sebagai ranah yang terbuka bagi setiap orang untuk terlibat di dalamnya secara bebas ternyata secara historis berkembang meninggalkan maknanya yang bersifat spontan, dipahami menjadi sebuah konsep politik yang mengajukan sejumlah syarat bagi setiap orang untuk bisa terlibat di dalamnya. Habermas menyadari makna ruang publik yang secara politis dikonsepkan sebagai sebuah sistem interaksi harus merefleksikan maknanya yang spontan sebagai sebuah kemungkinan yang terbuka bagi siapa pun untuk terlibat di dalamnya. (Hardiman, 2009: 139)

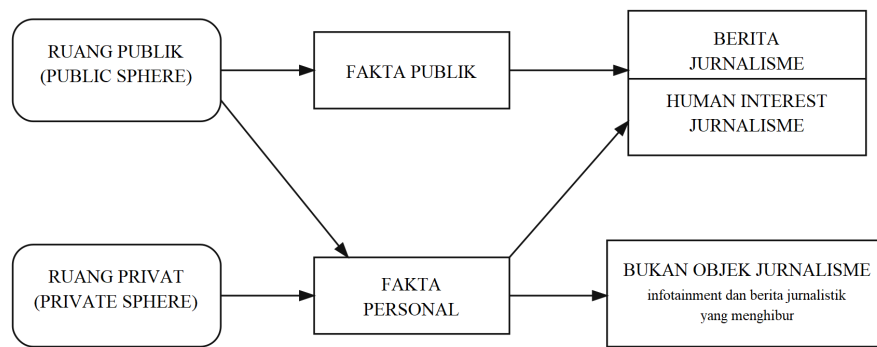
Pada akhir abad ke-17 dan memasuki abad ke-18, terjadi perubahan bentuk menjadi surat kabar (*newspaper*). Perubahan ini awalnya dimulai dengan penggabungan pamflet-pamflet dalam jumlah halaman yang kecil menjadi bentuk terbitan dalam halaman yang lebih banyak (pada saat itu dikenal dengan sebutan *newsbooks*). Namun, karena *newsbooks* masih dianggap kurang memadai untuk menampilkan informasi yang lebih banyak, maka surat kabar pun dibentuk dengan ukuran dan jumlah halaman yang lebih banyak. Usaha-usaha penerbitan surat kabar untuk mencari keuntungan kemudian mulai dikembangkan oleh para pengusaha, bahkan oleh keluarga dalam bentuk usaha rumah tangga. Pada 1816 koran-koran kemudian dicetak untuk pertama kalinya dalam jumlah yang besar; 50.000 eksemplar (Habermas, 1989:168). Reputasi penerbitan kemudian tidak lagi bertumpu pada kemampuan pewarta atau editor seperti yang dilakukan oleh individu-individu penulis pamflet, tetapi lebih dilihat berdasarkan popularitas surat kabar. Proses komodifikasi ini membawa dampak pula bagi kemunculan peredaran surat kabar pertama di berbagai negara. Persaingan antar penerbit pun kian membesar ketika teknologi baru mulai bermunculan. Pers terus berkembang menjadi ruang dalam penyampaian opini publik, hingga kemudian konsep jurnalisme publik dikenal. Menurut Habermas otonomi wartawan para editor dibatasi dengan sangat ketat, bahkan di dalam jenis pers yang tidak tunduk kepada hukum-hukum pasar selain tujuan politis semata. Hal ini dalam hubungannya dengan jurnalisme kesusastaannya jurnal-jurnal yang mengedepankan perdebatan rasional kritis. Untuk sementara waktu, pers politik memang dikelola menurut gaya individualis, bahkan setelah faksi-faksi dan partai-partai di parlemen Inggris raya dan perancis mendirikan pers politiknya masing-masing. Aspek-aspek transformasi struktural pers yang berkaitan dengan sosiologi kegiatan bisnis tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan umum kala itu menuju pengonsentrasian dan pemusatan bisnis. Homogenisasi layanan berita oleh badan-badan pers yang terorganisasi

editorial surat kabar harian skala kecil lewat penggunaan plat bersama dan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang pelengkap lainnya. (Habermas, 2012: 261)

Arah pergeseran dari jurnalisme sastra privat menjadi jasa layanan publik media massa ini, ruang publik diubah oleh gelombang kepentingan privat yang memperoleh hak istimewa bagi penyiarannya meski tujuan sama merek sama sekali bukan representasi bagi kepentingan-kepentingan masyarakat privat sebagai publik. Pemisahan ruang publik dan ruang privat ini menyiarkan bahwa persaingan di antara kepentingan-kepentingan privat pada prinsipnya diserahkan kepada pasar sebagai kekuatan pengaturnya dan dipertahankan di luar konflik opini. Namun begitu, bagi tindakan-tindakan ruang publik yang menjadi wilayah pengiklan bisnis, masyarakat privat sebagai pemilik “properti privat” memiliki efek langsung terhadap masyarakat privat sebagai publik. Di dalam proses ini yang jelas adalah perubahan ruang publik menjadi medium periklanan didominasi sepenuhnya oleh komersialisasi pers. Sebaliknya, komersialisasi tersebut juga digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan pengiklan bisnis yang secara independen lahir dari konfigurasi-konfigurasi ekonomi itu sendiri. (Habermas, 2012: 261) Habermas memulai pemaparan mengenai relasi ruang publik dan pers dengan mengkaji pengertian-pengertian tentang ruang publik. Dalam masyarakat feodal, publik dipahami sebagai status sosial yang bersifat keningratan. Kalangan penguasa dan gereja adalah orang-orang publik yang memiliki hak istimewa di hadapan masyarakat umum. Pada masyarakat feodal ini, Habermas memandang bahwa antara ruang publik dan ruang privat belum terdapat pemisahan yang jelas. Pemisahan ruang publik dan privat baru mulai ditemukan pada masyarakat Romawi di mana publik benar-benar ruang tempat kepentingan-kepentingan publik diperjuangkan. Sementara itu privat menjadi urusan pribadi setiap individu. Di dalam ruang publik, masyarakat dapat berdiskusi, melakukan kritik dan menyampaikan pendapatnya. Ruang publik menjadi tempat yang bisa diakses oleh semua orang, bersifat terbuka, dan inklusif. Konsep ruang publik ini diterima sebagai ruang demokratis hingga saat ini. Pemaparan Habermas mengenai ruang publik dan pers tidak lepas dari tinjauannya mengenai perkembangan kapitalisme di Eropa. Kapitalisme awal di abad ke-17 memperlihatkan pertemuan antara kepentingan-kepentingan masyarakat di ruang publik, dengan pers sebagai saluran aspirasi publik. Pengelolaan informasi dimulai dari hal sederhana yang langsung berkaitan dengan kepentingan bisnis, seperti informasi mengenai barang dagangan yang diperlukan masyarakat.

Sebagaimana yang dianalisis Habermas, ruang publik dan saluran publik sebagai tempat pertemuan masyarakat lambat laun bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu saluran publik yang hingga saat ini besar sekali manfaat dan pengaruhnya bagi masyarakat adalah pers. Kelahiran pers di Eropa, terutama di Inggris, Perancis, dan Jerman, telah mengubah struktur sosial masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya sangat feodal, lambat laun kekuatannya mulai berkurang. Peranan kaum borjuis sangat besar dalam melakukan transformasi tersebut. Mereka membuka ruang publik sastra di mana individu-individu dapat berkumpul dan mendiskusikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan bersama. Dari ruang sastra inilah ruang publik politis muncul, dan dianggap sebagai cikal bakal semangat kemunculan pers. Di dalam ruang publik sastra, setiap individu privat diberi hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, pandangan, maupun kritik. Begitu pula orang-orang yang datang ke kedai-kedai-sebagai tempat di mana ruang publik sastra berlangsung-tidak hanya didominasi oleh kalangan borjuis, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat umum. Perkembangan pers ini pada akhirnya mengubah apa yang disebut sebagai kelas menengah (borjuis). Ia bukan hanya berasal dari kalangan pedagang sebagaimana makna awalnya, tetapi sudah menyebar meliputi kalangan intelektual, para pekerja, maupun pegawai. Pemisahan antara ruang publik dan ruang privat pun sudah mulai dilakukan. Memasuki era kapitalisme terutama di abad ke-17, ruang publik mulai mendapat ancaman. Ancaman yang dimaksud bukan dalam pengertian sensor dari kekuasaan, tetapi ancaman dari komersialisasi pers sebagai ruang publik kritis. Habermas melihat bahwa komodifikasi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha terhadap berita dan pers menjadikan ruang-ruang kritis masyarakat semakin berkurang. Pers kini lebih banyak memuat berita-berita tentang kejahatan, seks, gosip, maupun hal-hal yang sensasional. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya, pers terus mengalami peningkatan dari segi jumlah pembaca. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan koran mulai diorganisasikan ke dalam perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun internasional. Penciptaan nilai, pembagian rubrikasi berita, dan tabloidisasi dilakukan demi tercapainya keuntungan dari bisnis penerbitan tersebut. Habermas melihat ruang publik sudah tidak ada lagi batasannya dengan ruang privat ketika iklan-iklan ini muncul di dalam pers. Habermas konsisten terhadap pemisahan yang ia lakukan antara ruang publik dengan ruang privat. Baginya, ruang privat tidak boleh dicampurkan dengan ruang publik. Namun sayangnya hal tersebut kini sudah menjadi biasa, iklan-iklan yang muncul di dalam pers memperlihatkan bagaimana pertarungan-pertarungan kepentingan privat telah masuk ke dalam wilayah publik. Pers pun menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Kalau keadaannya sudah seperti ini, maka pers sebagai ruang publik kritis berubah menjadi panggung perdagangan dan panggung tontonan.

Menurut Ashadi dalam buku *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika* (2006: 69) menjelaskan bahwa media pers tidak berada di ruang hampa. Oleh karena itu, silang sengkabut pelaksanaan dan penataan kode etik wartawan oleh pelaku profesi kewartawanan tidak terlepas dari praksis norma penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Jurnalistik sebagai keterampilan teknis dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari propaganda, bahkan pornografi. Teknik jurnalistik dapat digunakan untuk kepentingan pragmatis komunikator dan khalayak. Komodifikasi informasi pers merupakan bentuk yang umum dalam penggunaan teknik jurnalistik. Sementara jurnalisme bertolak dari epistemologi yang membawa konsekuensi dalam metodologi dan konteks keberadaannya dalam memproses fakta publik. Landasan operasi dari epistemologi jurnalisme adalah fakta publik dalam kaitan dengan ruang publik.

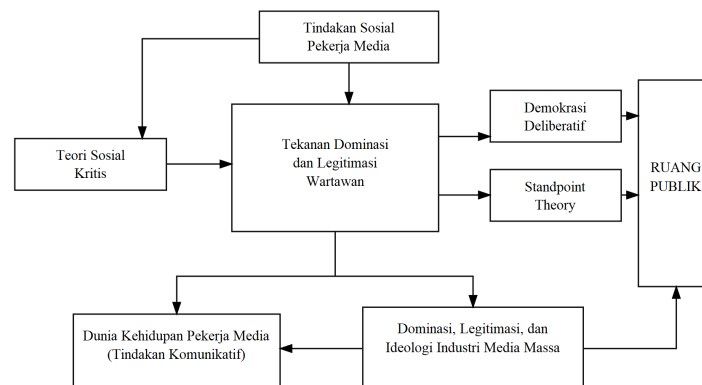


Gambar 1: Konstelasi Operasi Media Pers
Sumber: Ashadi Siregar, 2006:71

Jurnalisme publik muncul sebagai jawab atas problem yang dihadapi pers sebagai ruang publik. Dalam pandangan Habermas, jurnalisme publik ini berupaya untuk mengembalikan fungsi pers sebagai ruang publik kritis sebagaimana yang dilakukan saat kemunculannya. Pers harus dibentuk sebagai media perjuangan, media penyampaian aspirasi, ekspresi, dan opini publik, serta harus menjadi pembela pada kepentingan emansipatoris. Inti dari jurnalisme publik tersebut tidak lain untuk mendorong keterlibatan masyarakat di dalam partisipasi publik secara lebih luas. Ketika teks produksi pers tersebar secara luas, maka teks sudah masuk ke dalam konsumsi ruang publik sehingga dalam arti diatur dalam perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. Teks ketika keluar dan tersebar, maka teks dapat diinterpretasikan secara bebas. Sehingga penafsiran terhadap teks (baik tulisan atau penuturan seseorang) bisa bebas. Aturan prosedur di dalam penafsiran memperhatikan aspek manusia dan rasio individu yang otonom yang dipahami.

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjabaran permasalahan dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dibuat kerangka pemikiran dengan melihat Tekanan Dominasi dan legitimasi yang diterima wartawan di industri media massa tempatnya bekerja, hal ini yang menjadi persoalan krisis dalam institusi individu maupun diri wartawan itu sendiri.



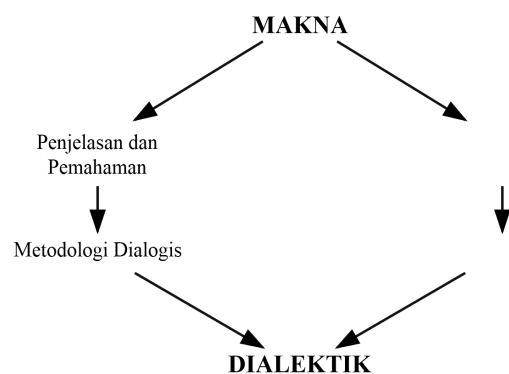
Gambar 2: Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah dari kerangka penelitian

4. Metode Penelitian

Pengumpulan data menggunakan snowball sampling, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam kegiatan kewartawanan, sedangkan informan berperan sebagai partisipan yang memberikan data pengamatan sekunder. Observasi dilakukan di Kedai Perjoeangan, Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengamati kondisi dan situasi ruang publik para wartawan. Dokumentasi digunakan sebagai data sekunder penelitian.

Peneliti menggunakan reflektif hermeneutis atau hermeneutika dalam yang menekankan upaya melakukan pembacaan teks yang sangat dekat dan terperinci untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta merefleksikan perspektif kajian dan pemahaman terhadap teori maupun fenomena yang terjadi. Teks dapat berarti pembicaraan, kata-kata tertulis, atau gambar. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model hermeneutika Habermas yaitu penafsiran terhadap subjek (individu) sebagai teks. Pembahasan Habermas terhadap penjelasan dan pemahaman menunjukkan indikasi awal bahwa ternyata ada perbedaan orientasi hermeneutis antara keduanya.

Pemahaman hermeneutis mempertemukan penjelasan teoretis dengan pengalaman subjek. Pemaknaan objek dipengaruhi oleh pengalaman dan aktivitas interpretatif subjek; karena itu, makna dipahami melalui hubungan dinamis antara fakta, pengalaman, dan penafsiran (Riyadi, 2010:220-221).



Gambar 3: Skema Hermeneutika Habermas
Sumber: Diadaptasi dari skema pada naskah sumber

Penafsiran yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menafsirkan relasi dalam interaksi masyarakat dalam lingkup pekerja pers di dalam ruang publik Kedai Kopi Perjoeangan, dan juga menafsirkan bentuk-bentuk tindakan komunikasi melalui relasi bahasa dan bagaimana kekuasaan bahasa yang digunakan dalam dominasi dan legitimasi yang diberlakukan bagi pekerja. Jika kita memahami masyarakat sebagai sistem, maka fakta bahwa realitas sosial terletak di dalam faktisitas klaim-klaim kesahihan yang diakui, bahkan sering kontra-faktual, tetap tidak akan terpahami. Dengan perspektif sistem, maka peneliti akan dapat menyoroti mekanisme-mekanisme pengendalian masyarakat dan perluasan wilayah kemungkinan (contingency). Kita akan mengenali peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi tersebut berdasarkan ketergantungan mereka pada fungsi-fungsi integrasi sistem, sementara nilai-nilai tujuan berfungsi sebagai data. Sistem-sistem sosial ini dianalisa berdasarkan kemampuan mereka dalam mempertahankan batasan dan kelangsungan eksistensinya dengan cara mengatasi kompleksitas lingkungan yang tidak menentu.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Kedai Kopi Perjoeangan sebagai Ruang Publik

Kedai Kopi Perjoeangan menjadi tempat pekerja pers di Jakarta menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengalaman kerja. Sebagai kafe yang terjangkau dan terbuka bagi berbagai kelompok sosial, tempat ini memungkinkan wartawan bertemu di luar struktur formal perusahaan media. Pertemuan tersebut membentuk jaringan, pertukaran informasi, dan solidaritas yang mendukung pembicaraan mengenai hak profesional serta kesejahteraan pekerja pers.

Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kedai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsumsi, tetapi juga sebagai ruang publik politis. Wartawan dapat membicarakan tekanan redaksional, beban kerja, pendapatan, dan hubungan dengan aktor politik tanpa berada langsung di bawah hierarki medianya. Dalam konteks ini, ruang fisik kedai menyediakan kondisi bagi terbentuknya opini serta aspirasi bersama.

Keterbukaan ruang tidak otomatis menjamin komunikasi yang sepenuhnya bebas. Interaksi dapat berlangsung spontan dan rasional, tetapi dapat pula diarahkan oleh fasilitator atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Kedai Kopi Perjoeangan karena itu dipahami sebagai ruang publik yang mempertemukan potensi deliberasi dengan kemungkinan komunikasi strategis.

5.2. Klaim Validitas dalam Komunikasi Pekerja Pers

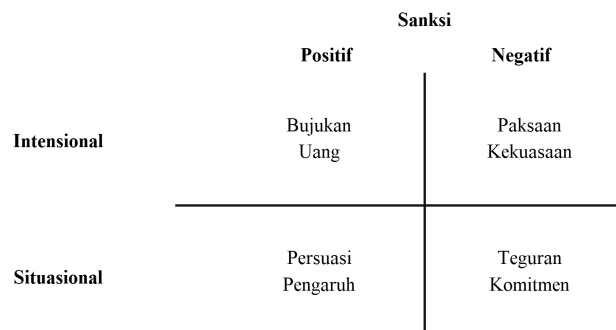
Klaim komprehensibilitas terlihat ketika wartawan menggunakan pengalaman dan istilah profesi yang dipahami bersama. Kesamaan latar kerja memudahkan mereka menjelaskan persoalan redaksional, relasi dengan narasumber, serta kelayakan hidup. Pertukaran kontak dan informasi juga memperluas jejaring antarmedia serta memperkuat kemandirian kelompok.

Klaim kebenaran muncul melalui tuntutan agar informasi mengenai kondisi kerja didasarkan pada pengalaman, data, dan fakta. Klaim ketepatan berkaitan dengan penilaian terhadap perintah redaksi, kode etik, Undang-Undang Pers, serta norma profesional. Klaim kejujuran terlihat pada kesediaan peserta mengungkapkan pengalaman tekanan, keterbatasan otonomi, dan konflik kepentingan yang mereka alami.

Temuan memperlihatkan bahwa kebebasan pers pada tingkat institusi tidak selalu identik dengan kebebasan wartawan di lapangan. Target peliputan, jam kerja panjang, dan kepentingan politik perusahaan dapat membatasi pilihan pekerja. Diskusi di kedai mengubah pengalaman yang sebelumnya diterima sebagai rutinitas menjadi masalah yang dipersoalkan secara reflektif dan argumentatif.

5.3. Dominasi, Legitimasi, dan Profesionalitas Kewartawanan

Relasi pertukaran dalam organisasi media berlangsung melalui uang, kuasa, pengaruh, dan komitmen. Keempat media tersebut menstrukturkan interaksi dan dapat berfungsi sebagai bujukan, paksaan, persuasi, atau teguran (Heath dalam Habermas, 2004:12-13). Kerangka ini digunakan untuk membaca bagaimana perusahaan media memperoleh kepatuhan pekerja sekaligus bagaimana pekerja membangun tanggapan kolektif.



Gambar 4: Tipe Media yang Memengaruhi Profesionalitas Kewartawanan
Sumber: Heath dalam Habermas, 2004:13

Kesaksian informan menunjukkan bahwa penugasan yang berkaitan dengan rekanan politik dapat ditawarkan melalui janji pendapatan tambahan. Pada sisi lain, pekerja lini bawah menghadapi kewajiban mengikuti perintah atasan dan ancaman kehilangan pekerjaan. Ideologi media juga bekerja melalui persuasi yang membingkai kepentingan institusi sebagai kebutuhan profesional pekerja.

Komitmen terhadap perusahaan dapat membatasi otonomi wartawan untuk bertindak sesuai penilaian profesionalnya. Kelompok wartawan di Kedai Kopi Perjoeangan berupaya membalik relasi tersebut dengan menempatkan pengalaman pekerja lini bawah sebagai dasar pembicaraan. Partisipasi dipandang sah apabila pendapat disertai fakta atau pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi diwujudkan melalui diskusi rutin, seminar kecil, lokakarya, dan pertemuan antarwartawan. Kegiatan itu tidak bersifat wajib dan ditujukan untuk menjaga relasi serta menyusun aspirasi bersama. Melalui proses tersebut, pekerja pers membangun kekuatan deliberatif yang relatif independen dari institusi media dan berorientasi pada keadilan kerja serta profesionalitas jurnalistik.

Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk mengubah pengalaman pribadi menjadi pernyataan, harapan normatif, dan tuntutan bersama. Kesepakatan memerlukan pengakuan antarsubjektif terhadap keabsahan ujaran peserta. Namun, peneliti juga menemukan komunikasi teragendakan yang dapat bersifat manipulatif atau persuasif ketika diarahkan oleh aktor yang memiliki kepentingan tersendiri.

Pembedaan antara komunikasi rasional dan strategis menjelaskan mengapa ruang publik tidak selalu menghasilkan kepentingan terbaik bersama. Pada saat yang sama, pembicaraan egaliter memungkinkan pekerja pers menuntut pengakuan atas perannya sebagai pilar demokrasi, pendapatan yang layak, beban kerja yang proporsional, dan pelaksanaan profesi yang tidak dibebani kepentingan politik sepihak.

Asosiasi profesi dipandang penting sebagai pusat koordinasi, penjaga kebebasan pers, dan penghubung aspirasi wartawan dengan pemerintah. Peneliti menilai peran tersebut perlu menjangkau persoalan hak, pendapatan, dan kelayakan hidup pekerja. Regulasi dan organisasi profesi dengan demikian dibutuhkan untuk menerjemahkan kekuasaan komunikatif pekerja ke dalam perlindungan administratif yang sah.

6. Kesimpulan

Demokrasi deliberatif yang dibangun kelompok pekerja pers bertumpu pada otonomi individu dan partisipasi dalam pembentukan aspirasi. Diskursus publik memberi ruang untuk menuntut pelaksanaan Undang-Undang Pers dan kode etik, profesionalitas kerja, pendapatan yang layak, beban kerja yang proporsional, serta kebebasan dari tekanan politik sepihak. Pergerakan tersebut terbuka bagi pekerja pers yang bersedia menyampaikan pengalaman dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedai Kopi Perjoeangan berfungsi sebagai ruang publik tempat pekerja pers membentuk opini, solidaritas, dan tuntutan profesional. Namun, komunikasi yang berlangsung masih dapat dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu sehingga belum selalu menghasilkan manfaat bersama. Peneliti mengusulkan ruang publik khusus yang difasilitasi pemerintah untuk menjembatani hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan media, tanpa mengurangi otonomi profesi maupun kebebasan diskursus.

Daftar Pustaka

- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Camus, Albert. 2017. *Krisis Kebebasan*. Jakarta: Buku Obor.
- Camus, Albert. 2017. *Seni, Politik dan Pemberontak*. Jakarta: Buku Obor.
- Camus, Albert. 2018. *Pemberontakan*. Jakarta: Buku Obor.
- Creswell, John. W. 2015. *Riset Desain Kualitatif: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dua, Michael. 2013. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Kupang: Penerbit Ledalero.
- Habermas, Jürgen. 2004. *Krisis Legitimasi*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Habermas, Jürgen. 2009. *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Vol 1 dan 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habermas, Jürgen. 2010. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Habermas, Jürgen. 2012. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadi, Parni. 2014. *Jurnalisme Profetik*. Jakarta: Dompot Dhuafa & Insani Maksima Promosindo.
- Hardiman, Budi F. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hardiman, Budi F. 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hardiman, Budi F. 2010. *Seni Memahami*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hardiman, Budi. F. 2010. *Ruang Publik (Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace)*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Lechte, John. 2001. *50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Littlejohn, Stephen W., & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Press.
- McCharty, Thomas. 2003. *Teori Kritis Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Poespowardojo, Soerjanto. T. M. & Alexander Seran. 2016. *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Pusey, Michael. 2011. *Habermas (Dasar dan Konteks Pemikiran)*. Yogyakarta: Resist Book.
- Riyadi, Ahmad Ali. 2010. *Hermeneutika Ilmu-Ilmu Sosial: Studi atas Pemikiran Jürgen Habermas*. Dalam Edi Mulyono dkk., *Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Siregar, Ashadi. 2006. *Dari Kode Etik Wartawan Indonesia ke Dewan Pers*. Makalah Lokakarya Membangun Kebebasan Pers yang Beretika, Dewan Pers, Jakarta, 17 Januari 2006.
- Sugihartati, Rahma. 2018. *Membaca, Gaya Hidup dan Kapitalisme (Kajian Tentang Reading for Pleasure dari Perspektif Cultural Studies)*. Jakarta: Suluh Media.
- Suseno, Franz Magnis. 1994. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Suyanto, Bagong. 2017. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- West, Shane dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Ed. 3. Buku 1 & 2. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

